



Masa Transisi Politik Mempengaruhi Substansi Penganggaran

Sekretaris Daerah Kayong Utara, Hilaria Yusnani membuka sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (23/7).

Menurut Hilaria, tahun 2020 merupakan masa transisi politik, di mana terjadi pergantian anggota DPRD Kayong Utara. Hal ini berdampak pada proses penyusunan APBD tahun anggaran 2020, baik dari segi pembahasan maupun substansi dari APBD itu sendiri. "Oleh karena itu hal tersebut harus benar-benar dicermati sehingga APBD 2020 dapat ditetapkan tepat waktu, serta fokus diarahkan pada program dan kegiatan yang berorientasi

pada kepentingan publik," terang Hilaria. Hilaria menjelaskan, pemerintah wajib memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar gaji, anggaran infrastruktur yang bersumber dari dana transfer umum sebesar 25 persen, anggaran peningkatan kapasitas SDM sekurang-kurangnya 0,34 persen untuk pemerintah provinsi dan 0,16 persen untuk pemerintah kabupaten

atau kota dari total belanja daerah. "Sedangkan alokasi Anggaran Penguatan APIP sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,9 persen dari total belanja daerah," ungkapnya. Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, sabung Hilaria, adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini pemeriksaan BPK. "Saya berpendapat dengan berbagai regulasi yang

ada. Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja," sebut Hilaria. Pedoman penyusunan APBD, dikatakannya menjadi mutlak karena merupakan koridor yang harus menjadi acuan dan dipatuhi semua pihak yang terlibat

dalam penyusunan APBD. Tanpa adanya APBD yang baik dan berkualitas maka tidak ada dasar pembiayaan untuk melaksanakan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, pengeloaan sumber daya daerah dan pemberdayaan masyarakat. "Harus kita sadari bahwa proses penyusunan APBD bersifat kompleks, karena selain menggunakan pendekatan teknokratis juga politis. Akan banyak kepentingan berbagai pihak dalam penyusunan APBD," tukasnya. (ble/je)



HUMAS

SOSIALISASI – Sekda Kayong Utara, Hilaria Yusnani membuka sosialisasi tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Penyusunan APBD akan dilakukan cermat dan berpihak pada masyarakat.